

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021

Nofa Angraini¹, Teguh Hidayat²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

E-mail: nofaangraini1012@gmail.com¹, Teguhhidayat377@gmail.com²

Abstract. *Financial performance is a useful indicator for assessing local government performance. Regional financial performance is an achievement of programs/policies that have been planned by the regional government for a certain period which is then measured using financial indicators. This study aims to analyze the effect of regional original income and regional expenditure on regional financial performance, as well as to determine which variables have the most dominant influence on regional financial performance in the districts/cities of West Sumatra province. The data processed is secondary data from the 2018-2021 Annual Report of the Regency/City of West Sumatra taken by Total Sampling. The method used in this study is the method of panel data regression analysis using the Eviews 10 application. The results of the research state that: Local Revenue and Regional Expenditure together have a significant effect on regional financial performance. Partially Local Own Revenue has a negative effect on regional financial performance and Regional Expenditure has a positive effect on regional financial performance.*

Keywords: *Regional Original Income, Regional Expenditures, Regional Financial Performance*

Abstrak. Kinerja keuangan merupakan penunjuk yang berguna untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan suatu pencapaian dari program/ kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang kemudian diukur dengan menggunakan indikator- indikator keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan daerah, serta untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten/ Kota provinsi Sumatera Barat. Data yang diolah merupakan data sekunder dari laporan Tahunan Kabupaten/ kota Sumatera Barat Tahun 2018-2021 yang diambil secara Total Sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis regresi data panel menggunakan aplikasi Eviews 10 hasil penelitian menyatakan bahwa : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah

LATAR BELAKANG

Indonesia memasuki era pergeseran orientasi pemerintahan dari *command and control* menjadi orientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik yang kemudian membentuk suatu otonomi daerah Saputri & Kurnia, (2020). Otonomi Daerah adalah hak suatu daerah untuk membuat peraturan sendiri, mengatur dan melaksanakan kebijakan serta mengelola keuangan daerahnya sendiri (Putu *et al.*, 2018).

Penerapan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah yang didapat melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah secara individu yang akan membantu untuk perluasan daerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengelola keseluruhan pembangunan daerah, oleh sebab itu pemerintah pusat menyerahkan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah guna mengelola seluruh kepentingan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan merupakan kunci penentu keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta pengaturan pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan bentuk dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Pendapatan Asli Daerah adalah kriteria suatu daerah mampu mendanai kegiatannya sendiri yang berasal murni dihasilkan dari daerah tersebut. Ketidakmampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya tercermin dari minimnya pendapatan asli daerah untuk mendanai belanja daerah, sehingga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah yang berakibat pada kesenjangan sosial dan jurang kemiskinan Saputri & Kurnia, (2020). Menurut Sari & Halmawati, (2021) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang- undang yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah merupakan seluruh tanggung jawab pemerintah daerah yang diyakini sebagai penurun nilai kekayaan bersih pada

periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah didistribusikan dengan mengutamakan permodalan urusan pemerintahan wajib berhubungan dengan pelayanan dasar dalam program memenuhi standar pelayanan minimal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 jenis belanja daerah meliputi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer Sari & Halmawati, (2021). Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menaikkan mutu hidup masyarakat dan memenuhi komitmen daerah dengan memaksimalkan anggarannya. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah maka akan semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Dengan semakin tinggi pelayanan yang diberikan, maka semakin banyak juga belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang tentu harus dikelola secara efisien agar dapat mempermudah dalam menjalankan program pembangunan pada daerah tersebut (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Pengelolaan keuangan merupakan kunci penentu keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta pengaturan pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan bentuk dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. seperti kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat serta mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya. dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan menjamin tercapainya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang nanti berdampak pada tingkat kinerja pemerintah daerah (Mustanda & Sari, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (perubahan kedua dari permendagri No. 13 Tahun 2006), kinerja merupakan tindakan atau rencana yang ingin atau bisa diperoleh yang berkecimpung dengan penerapan anggaran dengan tingkat dan kelebihan yang terukur (Mustanda & Sari, 2019). Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil dari pencapaian program/ kebijakan pemerintah melaksanakan tugasnya pada suatu organisasi. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu secara mandiri, pemerintah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Defitri *et al.*, (2017). kinerja keuangan merupakan penunjuk yang berguna untuk menilai kinerja pemerintah daerah. pengujian kinerja keuangan pemerintah menjadi penting karena memiliki dampak yang luar biasa pada sektor publik. Pengukuran kinerja keuangan digunakan sebagai cerminan dalam menilai

akuntabilitas keuangan daerah serta kemampuan untuk menegakkan otonomi daerah (Mustanda & Sari, 2019).

Menurut Saraswati & Rioni, (2019) Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjaga otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan dari keberhasilan suatu kebijakan atau program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu yang dapat diukur dengan indeks keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Halmawati, (2021) Pada tahun 2018 data laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari BPK RI menunjukkan bahwa, hampir semua daerah kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan terhadap PAD. Khususnya di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat yang mengalami penurunan PAD terendah. Akibatnya, kinerja keuangan pemerintah menjadi sangat rendah karena pemerintah kurang menggali sumber dan potensi daerah dengan baik. Fakta yang diterima dari BPK RI cabang Provinsi Sumbar adalah di sebagian besar Kabupaten dan Kota provinsi Sumatera Barat memiliki PAD yang relatif kecil. Persentase rata – rata APBD yang didistribusikan untuk pembangunan daerah masih berada dibawah 10% dari jumlah yang didistribusikan untuk pembangunan masing - masing daerah. Sebagian besar kabupaten lain di Sumatera Barat memiliki PAD di kisaran 5% dan 10% PAD yang dimiliki kota.

DPRD Sumbar masih menyorot terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal. Meskipun rata-rata realisasi pendapatan dan belanja daerah cukup tinggi namun masih ada 13 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang capaian realisasinya dibawah 92 persen pada tahun 2020. Katanya kondisi itu juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. DPRD mengingatkan, rendahnya realisasi anggaran akan berdampak kepada perekonomian daerah. “Sebab APBD masih menjadi sumber utama perekonomian daerah di Sumbar” (Fadly, 2021).

Realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 disebabkan oleh adanya realokasi yang dilakukan untuk penanganan dampak COVID-19. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan mencapai 99,10% atau senilai Rp 6,36 triliun, lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar 96,72% atau Rp 6,39 triliun. Realisasi belanja secara persentase pada triwulan IV 2020 mencapai 95,34% atau senilai Rp 6,41 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi triwulan IV 2019 sebesar 92,42% atau senilai Rp 6,55 triliun (Triwulan, 2021).

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemko Padang tahun 2021 diperkirakan mengalami penurunan. Rencana pendapatan daerah pada APBD tahun 2021 ini diperkirakan yakni sebesar Rp 2,55 T. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 130,55 M atau turun sekitar 5,11 persen. pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 yang direncanakan sebesar Rp 870,40 M. PAD tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 649,9 9M, retribusi daerah Rp 85,40 M, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 20 M serta lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp 115 Miliar. Selanjutnya, sumber pendapatan daerah lainnya, dari pendapatan transfer pada APBD 2021 yang ditargetkan sebesar Rp 1,56 T. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2021 ditargetkan sebesar Rp116,34 M (wan rais, 2020).

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian dan tahun penelitian, objek yang akan diteliti yaitu Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Barat yang akan diteliti kinerja keuangannya. hal ini karena, provinsi sumatera barat merupakan provinsi yang dikukuhkan dengan undang- undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 kemudian diundangkan dalam undang undang Nomor 61 Tahun 1958 merupakan salah satu pemerintah daerah di indonesia yang sedang menjalankan otonomi daerah. Selaku pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah sumatera barat dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian sangat erat hubungannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah pusat dan pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak sesuai dalam peraturan Perundang-Undangan (Saputri & Kurnia, 2020).

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah setiap pengeluaran kas atau kewajiban daerah yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pemenuhan kewajiban daerah tersebut dengan memaksimalkan anggaran yang dimilikinya (Salsabilla & Rahayu, 2021)

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat capaian dari suatu pekerjaan dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditentukan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya (Saputri & Kurnia, 2020)

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penghasilan yang paling penting bagi sebuah daerah untuk memenuhi kebutuhannya. selain itu, PAD juga berperan penting dalam menentukan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh sebab itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut diperlukan untuk mendanai segala kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari & Halmawati, 2021).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu indikator kemandirian suatu daerah diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya

oleh karena itu, PAD memiliki peran yang penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah (Saputri & Kurnia, 2020).

Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya apabila daerah mampu mengelola dengan baik. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi - potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan menghasilkan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (Mustanda & Sari, 2019).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Mustanda & Sari, (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap kinerja keuangan daerah. peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan bagian penting dalam penerimaan daerah yang nantinya berperan dalam pembangunan daerah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah nantinya akan disesuaikan dengan pembangunan daerah guna melengkapi kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini juga berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Rioni, (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, artinya kemakmuran suatu negara atau daerah ditentukan dengan besarnya nilai tambah yang tercipta berupa pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan nilai tambah yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah, infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD dan intergovernmental revenue juga menambah belanja modal pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan Saputri & Kurnia, (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, adanya kenaikan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah

akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerahnya (Mustanda & Sari, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiana & Rahayu, (2021) Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti, realisasi pendapatan asli daerah yang tinggi tidak didukung dengan kinerja yang optimal Sehingga mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ni Kadek Novia Indrawati putri & Darmayanti, (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali” juga menjelaskan bahwa hubungan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah negatif, bermakna bahwa PAD yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kemampuan sumber daya keuangan suatu daerah yang nantinya akan digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. perolehan kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah belum optimal sehingga tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini mengindikasikan implikasi bahwa pemerintah daerah dengan PAD yang tinggi seharusnya diikuti dengan kinerja keuangan yang tinggi pula. Pemerintah daerah dengan PAD tinggi tetapi tidak diikuti dengan kinerja keuangan pemerintah yang baik maka pemerintah daerah tersebut diharapkan untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menunjukkan rendahnya tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan PAD agar dapat mewujudkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. adanya kenaikan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan dari sumber pada penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan diatas bahwa dari kelima sumber yang dipaparkan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan asumsi tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu: H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Hubungan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran kas daerah atau seluruh kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, Belanja Daerah dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Total Realisasi Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pemenuhan kewajiban daerah tersebut dengan memaksimalkan anggaran yang dimilikinya. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah maka akan semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan semakin tinggi pelayanan yang diberikan, maka semakin banyak juga belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang tentu harus dikelola secara efisien agar dapat mempermudah dalam menjalankan program pembangunan pada daerah tersebut (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dapat berasal dari beberapa bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sari & Halmawati, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah terdiri dari; belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer (Sari & Halmawati, 2021).

Kegiatan belanja daerah turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Belanja yang dilakukan pemerintah memiliki fungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada kemandirian daerah

dan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada perekonomian (Saputri & Kurnia, 2020).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Kurnia, (2020) menunjukkan bahwa secara parsial belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Daerah. maksudnya, Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Jika Total belanja yang besar, akan mengakibatkan kinerja keuangan daerah semakin tidak baik karena adanya kemungkinan pengeluaran yang lebih banyak bersifat rutin dibandingkan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Salsabilla & Rahayu, (2021) juga mengungkapkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. penelitian ini dikuatkan dengan pernyataan bahwa Semakin tinggi belanja pemerintah daerah maka akan semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan semakin tinggi pelayanan yang diberikan, maka semakin banyak juga belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berakibat menurunnya kinerja keuangan daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Halmawati, (2021) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Putu et al., 2018) menyatakan bahwa keahlian dalam mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Permatasari & Trisnarningsih, (2022) membuktikan bahwa belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini Belanja Daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus berkualitas dan hal tersebut dapat berpengaruh dengan tingkat kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Shara, (2021) dengan judul “Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara” menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh Positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Armaja *et al*, (2017) menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh Positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini bermakna semakin tinggi belanja, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada Masyarakatnya. Seperti pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. merujuk kepada hal tersebut, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi juga kinerja pemerintah.

Dalam penilaian kinerja keuangan yang baik apabila pengalokasian belanja daerah sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian daerah yang nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah, maka berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Berdasarkan dari sumber pada penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan bahwa dari keenam sumber yang dipaparkan menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan asumsi tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

H₂: Belanja Daerah berpengaruh Positif terhadap kinerja keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel

Jenis penelitian yang dipakai ialah kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Positivisme, untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan instrumen penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang diberikan. Pengujian hipotesis adalah dugaan sementara yang tidak mutlak atas pertanyaan penelitian yang derajat kebenarannya belum kuat atau masih

diragukan, sehingga dilakukan observasi atau pengujian eksperimental (Sugiyono, 2017). Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu informasi yang terdiri dari beberapa mata pelajaran dengan beberapa periode waktu (Rasyid, 2018).

Penelitian memakai data panel karena data yang peneliti angkat terdiri atas beberapa objek dalam beberapa periode waktu, sedangkan skala pengukuran pada penelitian ialah skala Rasio. Adapun sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Data ini bersumber dari laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Sumatera Barat yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menunjukkan karakteristik dan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang dipelajari dan menarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Teknik sampling yang digunakan adalah Teknik total sampling yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan pada populasi akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, maka sampel pada penelitian ini ialah pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota.

Teknik Analisis Data

Uji Pemilihan Model

Common Effect Model (CEM)

Data yang diterapkan bersifat kualitatif karena metode ini menggabungkan semua data tanpa memandang waktu dan tempat survei *cross section*.

Fixed Effect Model (FEM)

Suatu pendekatan yang dapat tampil kontras antar objek, memang dengan koefisien relaps yang sama. Dampak menetap di alamat adalah bahwa protes mencakup konsisten konstan untuk periode waktu yang berbeda dan mencakup koefisien kambung dari kebesaran menetap dari waktu ke waktu.

Random Effect Model (REM)

Pendekatan yang memanfaatkan residual yang dianggap memiliki hubungan antara waktu dan antar objek, parameter yang kontras antar kabupaten dan antar waktu termasuk dalam kesalahan. Pertunjukan ini dikenal sebagai pertunjukan dampak tidak teratur yang sering disebut pertunjukan komponen kesalahan. Dengan menggunakan tayangan ini, kita dapat menghemat penggunaan

derajat kelenturan dan tidak mengurangi jumlah seperti FEM yang habis, hal ini menunjukkan bahwa parameter-parameter yang akan diestimasi akan lebih mumpuni.

Uji Kecocokan Model

Uji Chow

Digunakan untuk memilih acara yang akan digunakan antara *Common effect* dan *fixed effect*. Jika pada *Cross-section Chi-square* lebih kecil dari α () ($0.0000 < 0.05$), maka H_0 ditolak artinya model *Fixed Effect* lebih baik digunakan dari pada model *Common Effect* (Winarno, 2017).

H_0 : model menggunakan pendekatan *Common effect model*

H_a : model menggunakan pendekatan *Fixed effect model*

Uji Hausman

Digunakan untuk mengkarakterisasi pertunjukan *fixed effect* atau model *random effect* yang benar untuk digunakan sebagai model regresi data panel.

Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H_0 : model menggunakan pendekatan *fixed effect model*

H_a : model menggunakan pendekatan *random effect model*

Uji Hausman mengikuti distribusi chi kuadrat dengan k derajat kebebasan, di mana k adalah jumlah variabel bebas. Jika statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis, H_0 dibuang dan model yang paling sesuai adalah model efek tetap. Jika statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis, maka model yang sesuai adalah model efek acak.

- Jika probabilitas $< 0,05$ maka pemilihan yang terbaik model *Fixed effect model* (FEM)
- Jika probabilitas $> 0,05$ maka pemilihan yang terbaik model *random effect model* (REM)

Model Regresi Data Panel

mengungkapkan analisis regresi berguna untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi di dalam model *pool* data atau panel dilakukan berdasarkan penggunaan dua model waktu yaitu *time series* dan *cross section*. Pada penelitian ini model regresi panel yang digunakan dalam bentuk berganda yang dapat dirumuskan ke dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Kinerja Keuangan Daerah

= Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel independen

X_{1it} = Pendapatan Asli Daerah

X_{2it} = Belanja Daerah

ϵ_{it} = Variabel pengganggu (*Residual Error*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dipakai untuk menjelaskan seputar ringkasan sampel penelitian seperti maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh pengolahan data secara deskriptif seperti yang terlihat di tabel berikut :

Tabel 1

Statistik Deskriptif

	KKD	PAD	BD
Mean	2.440789	1.31E+08	2.28E+09
Maximum	106.8600	8.90E+08	8.65E+10
Minimum	0.100000	23848000	93952601
Std. Dev.	12.13799	1.64E+08	9.80E+09
Observations	76	76	76

Sumber: data sekunder yang diolah dengan EViews 10, 2023

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 sampel data yang diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota provinsi Sumatera Barat pada periode 2018-2021. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki nilai maksimum variabel Pendapatan Asli Daerah adalah senilai Rp 889.902.818 yang terdapat di kota Padang pada tahun 2021 serta nilai minimum senilai Rp 23.848.000 yang terdapat pada Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018 serta rata-rata(mean) sebesar Rp 131.282.486,5 dan standar deviasi senilai Rp 164.128.618,7 dengan jumlah pengamatan sebanyak 76.

Selanjutnya Variabel belanja Daerah (X_2) memiliki nilai maksimum Belanja Daerah senilai Rp 86.488.706.842 yang terdapat di Kabupaten Solok

Selatan pada tahun 2021 Serta nilai minimum senilai Rp 93.952.601.07 yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 Serta nilai rata-rata (mean) Rp 2.279.307.420 dan standar Deviasinya Rp 9.800.552.199 dengan jumlah pengamatan 76.

Kemudian Variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y) memiliki nilai maksimum senilai 106,8600 yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021. Serta nilai minimum senilai 0,100000 yang terdapat di Kabupaten Kepulauan mentawai pada tahun 2021. serta nilai rata-rata (Mean) 2,440789 dengan standar Deviasinya senilai 12,13799 dengan jumlah pengamatan sebanyak 76.

Pengujian Kelayakan Model Regresi Panel

Hasil Uji Chow

Tabel 2

Hasil pengujian likelihood (*Fixed Effect*)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	121.276058	(18,55)	0.0000
Cross-section Chi-square	281.655306	18	0.0000

Sumber: data sekunder yang diolah dengan Eviews 10, 2023

Hipotesis pengujian yang dilakukan menggunakan Chow test, yaitu:

H_0 : *Probability* > 0,05 : model mengikuti *common effect model*

H_1 : *Probability* < 0, 05 : model mengikuti *fixed effect model*

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai *Probability* untuk *cross section chi-square* sebesar $0,0000 < 0,005$ sehingga hasil menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *fixed effect model* lebih tepat digunakan dari pada *common effect model* untuk mengestimasi data panel. Proses selanjutnya harus melalui Uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 3
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.968684	2	0.1375

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 10, 2023

Hipotesis pengujian yang dilakukan menggunakan hausman test, yaitu sebagai berikut:

H₀: Probability < 0,05 : Model mengikuti *fixed effect model*

H₁: Probability > 0,05 : Model mengikuti *Random effect model*

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai Probability untuk *cross-section random* sebesar 0,1375 > 0,005 sehingga hasil uji menunjukkan H₀ ditolak dan H₁ diterima, maka dapat disimpulkan *Random Effect Model* layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis

Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)

Tabel 4
Hasil Pemilihan Model Terbaik
Random Effect Model

Dependent Variable: KKD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/20/23 Time: 23:50
Sample: 2018 2021
Periods included: 4
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 76
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.121713	0.096883	-1.256287	0.2130
PAD	-1.95E-09	2.44E-10	-7.993230	0.0000
BD	1.24E-09	9.25E-13	1336.255	0.0000

Sumber: data sekunder yang diolah dengan E-views 10, 2023

Dari hasil regresi diperoleh nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar -1.948291 dengan nilai Probability yang lebih kecil dari alpha ($0,0000 < 0,05$) dengan T_{hitung} yang lebih kecil dari T_{tabel} secara absolut ($-7.993230 < 1,66571$). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Nilai koefisien Belanja Daerah 1.236462 dengan nilai probability kecil dari alpha ($0,0000 < 0,05$) dengan T_{hitung} yang lebih besar dari T_{tabel} secara absolut ($1336.255 > 1,66571$). Maka belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengujian Hipotesis

Uji T

Tabel 5

Pengujian Hipotesis Dengan Model *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-statistik	t-tabel	Prob	Alpha	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-1.948291	-7.993230	1,66571	0.0000	0,05	H1 Diterima
Belanja Daerah (BD)	1.236462	1336.255	1,66571	0.0000	0,05	H2 Diterima

Sumber : data sekunder yang diolah dengan E-views 10, 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai T_{hitung} untuk variabel pendapatan asli daerah senilai $-7.993230 < T_{tabel}$ 1,66571 serta prob 0.0000. Nilai prob. Pendapatan Asli Daerah senilai $0,0000 < 0,05$ maka keputusannya adalah H_1 diterima artinya terdapat terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021.

Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai T_{hitung} menggunakan variabel Belanja Daerah senilai $1336.255 > T_{tabel}$ 1,66571 serta prob 0.0000. nilai prob belanja daerah senilai $0.0000 < 0,05$ maka keputusannya adalah H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh Positif dan signifikan antara variabel Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi sumatera barat Tahun 2018- 2021.

Uji Determinasi (R^2)

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	0.999958
<i>Adjusted R-squared</i>	0.999957

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-views 10, 2023

Adjusted R-squared sebesar 0.999957 (99,9%) yang artinya variabel bebas yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah mampu menjelaskan Kinerja Keuangan Daerah dan 0,1 % dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam model ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 76 data observasi yang merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat periode 2018 – 2021 bisa disimpulkan bahwa Hipotesis pertama yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil statistik dengan analisis regresi data panel dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) membuktikan diterima, Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Artinya, Apabila PAD semakin besar maka terjadi penurunan pada rasio efisiensi yang merupakan representasi baiknya kinerja keuangan yang dihasilkan semakin rendah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu indikator kemandirian suatu daerah diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya oleh karena itu, PAD memiliki peran yang penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah (Saputri & Kurnia, 2020).

Hasil penelitian ini juga diperkuat melalui penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Ni Kadek Novia Indrawati putri & Darmayanti, (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali” menjelaskan bahwa

hubungan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah negatif, bermakna bahwa PAD yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kemampuan sumber daya keuangan suatu daerah yang nantinya akan digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Perolehan kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah belum optimal sehingga tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini mengindikasikan implikasi bahwa pemerintah daerah dengan PAD yang tinggi seharusnya diikuti dengan kinerja keuangan yang tinggi pula. Pemerintah daerah dengan PAD tinggi tetapi tidak diikuti dengan kinerja keuangan pemerintah yang baik maka pemerintah daerah tersebut diharapkan untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Hasil penelitian juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Budiana & Rahayu, (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti, realisasi pendapatan asli daerah yang tinggi tidak didukung dengan kinerja yang optimal. Sehingga mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah, dimana pendapatan asli daerah untuk saat ini mengalami penurunan karena munculnya kasus covid-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang berdampak pada perekonomian masyarakat daerah yang mengakibatkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Akan tetapi pemerintah berupaya dan berusaha untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Kembali.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 76 data observasi yang merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat periode 2018 – 2021 bisa disimpulkan bahwa Hipotesis kedua yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil uji nilai statistik dengan analisis regresi data panel dalam penelitian ini, untuk variabel Belanja Daerah membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) membuktikan

diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja Daerah maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin banyak pula. Apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Adapun klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer (Sari & Halmawati, 2021).

Hasil penelitian didukung dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Permatasari & Trisnaningsih, (2022). Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini Belanja Daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus berkualitas dan hal tersebut dapat berpengaruh dengan tingkat kinerja keuangan.

Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Armaja *et al*, (2017) yang menyatakan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artinya jika belanja daerah meningkat Rp 1 maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar Rp 1 Diperoleh hubungan positif belanja daerah dengan kinerja keuangan. Hal ini bermakna bahwa belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah, belanja Daerah terhadap kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa realisasi pendapatan asli daerah yang tinggi tidak didukung dengan kinerja yang optimal Sehingga mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. pemerintah daerah dengan PAD yang tinggi seharusnya diikuti dengan kinerja keuangan yang tinggi pula. Pemerintah daerah dengan PAD tinggi tetapi tidak diikuti dengan kinerja keuangan pemerintah yang baik maka pemerintah daerah tersebut diharapkan untuk melakukan perbaikan kedepannya.
2. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus berkualitas dan hal tersebut dapat berpengaruh dengan tingkat kinerja keuangan. Artinya jika belanja daerah meningkat Rp 1 maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar Rp 1. Hal ini bermakna bahwa belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Badan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal memungut pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan juga pemerintah harus bisa mengatur belanja daerah agar dapat mengatur keuangan daerahnya masing masing sehingga infrastruktur daerah lebih baik lagi sehingga pendapatan pemerintah juga meningkat pastinya.
2. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas data penelitian. Misalnya dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih relevan dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.
3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel lain dalam penelitian karena, selain Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah yang telah

digunakan dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa variabel lain yang bisa ditambahkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepadanya memohon pertolongan, Rahmat, dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya. Peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ketua STIE “KBP” Bapak Febryandhie Ananda, SE, M.Si, Wakil ketua Ibu Lidya Martha, SE, MM, Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Annisa, SE, AK, M.Acc, Pembimbing Akademik serta Pembimbing Bapak Teguh Hidayat, S.kom, M.Kom yang telah memberikan dukungan, arahan dan motivasi kepada penulis, dan terima kasih pada Badan Pusat Statistik telah memberikan bantuan data dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2020) THE. *E-Proceeding Of Management*, 8(6), 8368–8375.
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2017). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Fadly, W. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah Disorot DPRD*. <https://doi.org/https://sumbar.bpk.go.id/pengelolaan-keuangan-daerah-disorot-dprd/>
- Lestari, P. I., & Shara, Y. (2021). Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 345–359. <https://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8283>
- Mustanda, K., & Sari, N. M. D. P. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759–4787. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.V08.I08.P02>

- Ni Kadek Novia Indrawati Putri, & Darmayanti, N. P. A. (2019). PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI Ni. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834–2861.
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(6), 1573–1582. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>
- Putu, N., Sukma, G., Bagus, I., & Sedana, P. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Ni. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.V7.I02.P19> ISSN
- Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). *Pengaruh Wealth, Leverage Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019)* THE EFFECT OF WEALTH , LEVERAGE AND REGIONAL EXPENDITURE ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE (Case St. 8(6), 8479–8487.
- Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(23), 1–21.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, LEVERAGE, TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH* Dwi. 9(2), 110–120.
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat 1, 2. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D* (Sofia Yustiyani Suryandari (Ed.); Ke-3 Tahun). ALFABETA.
- Triwulan. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Februari 2021*. <https://doi.org/https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/pages/laporan-perekonomian-provinsi-sumatera-barat-februari-2021.aspx>
- Wan Rais. (2020). *Rancangan APBD Tahun 2021 Mengalami Penurunan*. <https://doi.org/https://padang.go.id/rancangan-apbd-tahun-2021-mengalami-penurunan>